

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis prudence) - Vol. 1: Pemahaman Awal*. 3 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Dworkin, Ronald. "Essays in Epistemology, Hermeneutics and Jurisprudence." In *Law, Interpretation and Reality*, diedit oleh Patrick Nerhot. Vol. 11. Netherland: AA Dordrecht, 1990.
- Gunanegara. *Hukum Pidana Agraria: Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana*. 1 ed. Jakarta: PT Tatanusa, 2017.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- . *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaan*. 12 ed. Jakarta: Djambatan, 2008.
- . *Sejarah Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Jan, Tjia Siauw. *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*. Bandung: Alumni, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional." In *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, diedit oleh Mochtar Kusumaatmadja. Bandung: Alumni, 2002.
- Manan, Bagir. "Hakim dan Sengketa Tanah." *Varia Pengadilan: Majalah Hukum Tahun XXV No. 290*, Januari 2010.
- . *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Pusat Penerbit LPPM Universitas Islam, 1995.
- . *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: AAI, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- MD, Moh. Mahfud. "Implementasi Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dan Perlindungan Hak-Hak Rakyat: Upaya Penataan dan Pengaturan Kembali Pemilikan dan Penguasaan Tanah, Makalah dalam Buku Reformasi Pertanahan." In *Reformasi Pertanahan*, diedit oleh Hasan Basri N.M., 27. Bandung: Mandar Maju, 2022.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-hak Atas Tanah*. 8 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Parangin, Effendi. *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1991.

- Parlindungan, A.P. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. *Quo Vadis Pendaftaran Tanah*. Makassar: PUKAP-Indonesia, 2009.
- Putih, Tim New Merah. *Undang-Undang Agraria No.5 Tahun 1960 - Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. 1 ed. Yogyakarta: New Merah Putih Galang Press, 2012.
- Rosawati, Tutut. "Analisis Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai Pelaksanaan Eksekusi Putus Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI N0 2096, K/Pdt/1987 tanggal 28 Desember 1987 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanaha." *Unpublished Dissertation (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)* (2010).
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sihombing, B.F. *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 2004.
- Soekanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia*. 1 ed. Surabaya: Arkola, 2003.
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Susanto, R. *Hukum Pertanahan (Agraria)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. 5 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarief, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Syaufan, Nurul. "Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Analisa Kasus Sengketa Tanah di Indonesia," n.d.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

2. Jurnal

- Auri. "Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 1 (2014).
- Kusuma Dadi Arja, Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat," *Jurnal Hukum* , no. 2 (2017).

- Masnadi, H, Ahmad Muliadi, dan Irawan Santosa. “Kepastian Hukum Terhadap Surat Girik Sebagai Dasar Bukti Pendaftaran Hak Atas Tanah.” *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 5, no. 1 (2021).
- Nurkristia Desy, “Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik,” *Jurnal Hukum* ,no. 1 (2021).
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).
- Tejawati, Desy. “Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah.” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021).

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)*, 1960.
- . *Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan*, 1985.
- . *Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*, 1996.
- . *Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, 1999.
- . *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun*, 2011.
- . *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah*, 1972.
- . *Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*, 1999.
- . *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 29 Tahun 2016 ttg Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di In*, 2016.
- . *Peraturan Pemerintah PP Nomor 40 Tahun 1996 Tanggal 17 Juni 1996 tentang Hak Guna Usaha*, 1996.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajibannya*, 1997.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah*, 2016.
- . *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.*, 2021.

4. Putusan

Indonesia, Mahkamah Agung. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1960 Tanggal 03 Februari 1960, 1960.*

